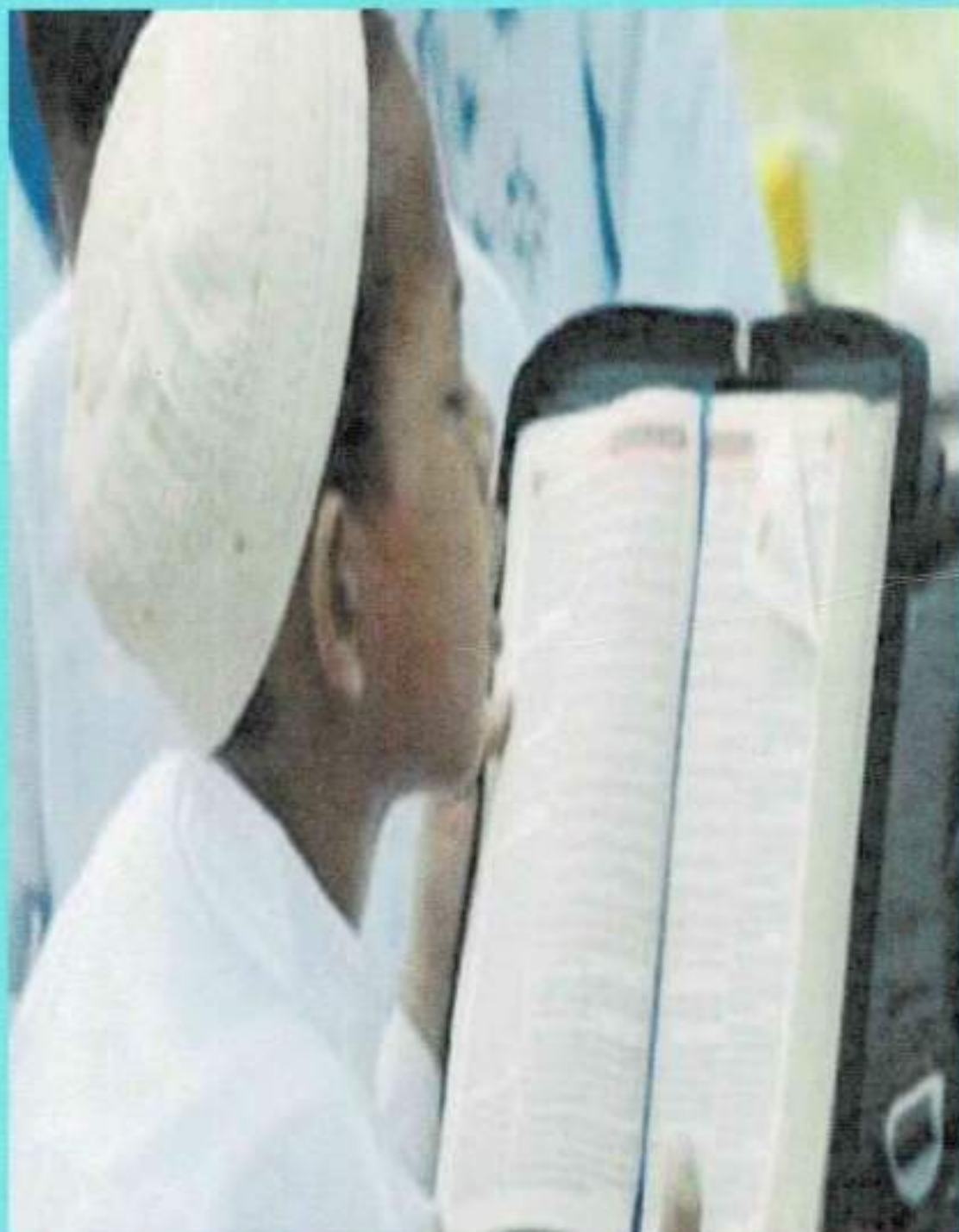




**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2013**



**PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK DALAM  
PERCERAIAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**WAHIDIN**



### PENGESAHAN

Nomor: Un.04/L.I/TL.03/ 409.1/2013

Judul : Perlindungan Hak Nafkah Anak Dalam Perceraian Keluarga di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Hukum Islam.

Peneliti : Wahidin, M.Ag

Fakultas/Unit : Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) Lektor

Bidang Ilmu : Hukum Islam

Jenis Penelitian : Terapan

Bentuk Penelitian : Individu

Lokasi : Pekanbaru

Waktu : Bulan April s.d Oktober 2013

Telah diseminarkan pada  
 Hari/Tanggal: Kamis, 28 Nopember 2013

Narasumber,

Prof. Dr. H.Samsul Nizar, M.Ag

Peneliti,

Wahidin, M.Ag

Mengetahui:  
 an. Rektor,  
 Ketua LPPM,



Musni Thamrin, M.Si  
 196908061994021001



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadhrat Allah SWT atas limpahan karunia dan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Shalawat dan salam senantiasa bagi Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini diselenggarakan atas biaya DIPA UIN SUSKA Riau melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor UIN SUSKA Riau serta Direktur LEMLIT UIN SUSKA beserta seluruh staf dan civitas akademik atas dukungannya bagi penelitian ini.

Selanjutnya, peneliti menyadari tulisan ini masih memiliki kekurangan baik dari metodologi maupun isi kajiannya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan sumbang saran demi lebih baiknya hasil penelitian ini. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian keislaman pada umumnya.

Pekanbaru, November 2013  
Peneliti

(Wahidin, MAg)

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| HALAMAN PENGESAHAN  |    |
| KATA PENGANTAR  |    |
| DAFTAR ISI  |    |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 4  |
| A. Latar Belakang Penelitian .....  | 4  |
| B. Masalah Penelitian.....  | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 8  |
| BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERCERAIAN<br>DAN NAFKAH ANAK.....  | 9  |
| A. Perceraian dalam Ajaran Islam.....   | 9  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....   | 27 |
| A. Penentuan Daerah Penelitian.....   | 29 |
| B. Jumlah Populasi dan Metode Pemilihan Sampel Penelitian .....   | 29 |
| C. Metode Pengumpulan Data .....  | 30 |
| D. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....   | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....   | 33 |
| A. Fenomena perlindungan hak nafkah atas anak korban perceraian di kota<br>Pekanbaru.....   | 33 |
| B. Perlindungan hak nafkah atas anak korban perceraian di Kota Pekanbaru dalam<br>perspektif Hukum Postitif dan Hukum Islam ..... | 46 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....   | 58 |
| A. Kesimpulan .....   | 58 |
| B. Saran.....   | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 61 |

# **PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PERCERAIAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan dan segala usaha harus dilakukan untuk menjaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Namun apabila semua harapan kasih sayang telah musnah, perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sehingga timbul saling membenci, saling tidak mempercayai, dan saling tidak menyukai maka untuk kepentingan kemaslahatan suami istri dan masyarakat disyariatkan adanya perceraian. Perceraian merupakan perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Suami boleh melepaskan haknya sebagai ganti dari mas kawinnya. Namun walaupun suami bebas melepaskan haknya untuk bercerai, ia harus tetap mengedepankan keutuhan rumah tangga dan meyakini bahwa cerai merupakan langkah terakhir. Apabila perceraian tidak dapat dielakkan lagi sehingga terjadi jatuhnya talak suami atas istrinya, maka istrinya wajib menjalankan masa iddah, yaitu masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, 1985), h. 326-327, 384. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992) , h. 206



Namun demikian perceraian dalam Islam hanya menyangkut hubungan suami dan isteri dan tidak anak. Dalam hal ini semestinya hak dan kewajiban terkait dengan anak tidak terputus dengan perceraian. Kewajiban nafkah menurut ajaran Islam mencakup nafkah terhadap anak dan Isteri. Khusus mengenai nafkah anak, anak merupakan amanah Allah yang wajib dipenuhi nafkahnya sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun.

Hanya saja dalam perkembangan masyarakat, keluarga sebagai elemen terkecil juga berkembang termasuk berbagai pranata yang ada di dalamnya. Hubungan antara anak dan orang tua (ayah dan ibu) serta perkembangan berbagai kebutuhan bagi anak memerlukan pemikiran baru dalam memahami hukum Islam berkenaan dengan nafkah anak. Untuk itu dalam makalah yang singkat ini penulis akan mencoba menguraikan paradigma baru dalam memahami nafkah anak agar hukum Islam dalam persepektif ini dapat dipahami sesuai dengan perkembangan tersebut.

Saat ini tingkat perceraian yang semakin meningkat sering menempatkan anak sebagai korban. Terlebih lagi di kota besar dimana persoalan keluarga seringkali menjadi akar putusnya hubungan perkawinan yang pada muaranya dapat mengorbankan dan mengabaikan hak nafkah atas anak. Di kota Pekanbaru, sebagai pusat administratif dan pemerintahan, berkembang sejarahnya sebagai kota perdagangan semenjak berbentuk sebuah dusun bernama payung sekaki. Kawasan yang terletak di tepi sungai Siak ini tepatnya di wilayah Senapelan merupakan

kawasan transit berbagai komoditas perdagangan sejak dahulu kala.<sup>2</sup> Secara resmi daerah ini menjadi pusat perdagangan sejak ditetapkan Raja Muhammad Ali sebagai wilayah dengan peruntukan perdagangan dengan nama pekan yang baharau. Nama ini yang kemudian menjadi cikal bagi nama kota Pekanbaru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Rajab 1204 H bertepatan dengan 23 Juni 1784 yang hingga sekarang diperingati sebagai hari jadi kota Pekanbaru.<sup>3</sup>

Peran kota Pekanbaru sebagai daerah perdagangan ini kemudian semakin menguat dengan pengukuhanannya sebagai daerah administratif, yakni dengan status daerah Controluer Pemerintah Hindia Belanda yang didasarkan pada Besluit Van der Inlandse Zelf Bestuur Van Siak no. 1 tahun 1919.<sup>4</sup> Dengan fungsi wilayah yang demikian penting dalam menghubungkan perdagangan dan administratif wilayah Riau daratan dengan pesisir maka seiring perjalanan waktu semakin berkembanglah kota Pekanbaru.

Pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru termasuk tinggi mengingat kota Pekanbaru yang sangat potensial sebagai magnet perekonomian. Faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah perkembangan kota Pekanbaru sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, sentral industri, lalu lintas antar dan dalam Propinsi serta kesempatan kerja dan usaha yang cukup luas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mosthamir Thalib, *Melancong Bumi Lancang Kuning*, (Jakarta: 1994, Pustaka Sastra) h. 9

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>5</sup> *Ibid.*



Kondisi masyarakat yang demikian berkebang cepat menempatkan persoalan sosial yang juga semakin banyak. Berjamurnya anak-anak terlantar di kota Pekanbaru merupakan salah satu indikasi bahwa hak nafkah anak sering terlantar dan diasumsikan akibat perpecahan dalam keluarga. Anak - anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepada mereka digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak ( pemerintah, masyarakat, dan keluarga ). Keluarga ( orang tua ) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perceraian itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam perceraian. Untuk itu dalam penelitian ini penulis berupaya untuk meneliti persoalan ini lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PERCERAIAN KELUARGA DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**



## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka demi terarahnya penelitian ini perlu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pengabaian hak atas anak korban perceraian di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana perlindungan hak anak korban perceraian dalam aturan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan konteks kajian penelitian dan permasalahan di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran fenomena pengabaian hak atas anak korban perceraian di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak nafkah atas anak korban perceraian dalam hukum Islam.

Disamping untuk tujuan di atas penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kajian empiris bagi penyelesaian permasalahan sosial di kota Pekanbaru. Untuk itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi para peneliti dan juga institusi yang berupaya menyelesaikan persoalan sosial termasuk anak-anak yang terlantar akibat tidak terpenuhinya hak nafkah atas mereka dengan berakhirnya sebuah keluarga akibat perceraian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH ANAK

#### A. Perceraian dalam Ajaran Islam

Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri dengan sebab-sebab tertentu<sup>6</sup>. Kata طلاق berasal dari *thalaqa* – *yathluqu* – *thalaqan* dan *thaliq* atau *thaliqah* menurut pendapat al-A'masyi atau *thaluqa* – *yathluqu* – *thalaqan* meskipun ditentang oleh al-Akhfasy. Dan *thalaq* bermakna mengurai ikatan pernikahan di mana asal maknanya adalah lepas (*inthilaq*), jadi wanita yang diceraikan (*muthallaqat*) berarti wanita yang kosong tidak mempunyai ikatan sebagaimana ungkapan *naqah thaliqah* berarti ternak peliharaan yang lepas tanpa tali ditinggalkan di padang rumput dan tidak diawasi penggembala. Sehingga perempuan yang sendirian tidak dalam ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki dan berhak menentukan jalan hidupnya disebut dengan *thaliqah* sebagaimana ternak yang lepas di padang rumput. Al-Raghib al-Isfahaniy kata *al-Thalaq* makna dasarnya adalah : نحر خلتها (lepas dari perjanjian/bebas tanpa ikatan).<sup>7</sup> Ketika dikatakan : طلق المرأة (Aku menjatuhkan *thalaq* wanita itu, sama artinya

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al Fikr, 1989), hlm. 347.

<sup>7</sup> Lihat Raghib al-Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfah al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Maktabah al-Ashriyyah, 2006), h. 324.



dengan melepaskannya yakni lepas dari ikatan pernikahan).<sup>11</sup> Inilah yang terkandung pada QS. al-Thalaq ayat 1 : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang) wajar...), QS. al-Baqarah ayat 229 : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (Thalaq yang yang-dirujuk itu dua kali) dan QS. al-Baqarah ayat 228 : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)), di mana maknanya *thalaq* di dalamnya mencakup pengertian yang bersifat umum, baik *thalaq* yang ada kebolehan untuk *ruju'* (kembali kepada ikatan pernikahan) maupun *thalaq* yang tidak ada kebolehan untuk *ruju'*.<sup>12</sup> Sedangkan pada ayat yang lainnya, *thalaq* bermakna khusus yakni *thalaq* yang tidak ada kebolehan untuk *ruju'* setelah tiga kali dilakukan kecuali setelah suaminya yang kedua telah menjatuhkan *thalaq* kepada mantan isterinya tersebut, seperti makna yang terkandung pada QS.al-Baqarah ayat 230 : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَا (Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu mentalaknya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali).<sup>13</sup>

Selanjutnya *Thalaq* ditinjau dari sudut istilah sebagaimana dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, adalah :

الطلاق هو حل العصة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

*"Pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus."*<sup>14</sup>

Menurut ulama Mazhab Syafi'i talak adalah:

الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*"Pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu."*<sup>15</sup>

Dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i ini tergambar bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam *talak raj'i* maupun dalam *talak ba'in*.<sup>16</sup> Sementara itu menurut ulama Mazhab Maliki, talak: "adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri."<sup>17</sup>

Mengenai ungkapan "secara langsung" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa talak yang hukumnya langsung berlaku ketika lafaz talak sudah diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Misalnya *talak ba'in Qubra* (talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya untuk yang ketiga kalinya), karena hukum dan segala akibatnya berlaku secara langsung dan seketika. Sedangkan ungkapan "untuk masa yang akan datang" adalah bahwa hukum talak itu belum

<sup>14</sup> Lihat al-Qurtubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz III, h. 126. Fakhr al-Din al-Razy, *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz III, h. 314.

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1994, Juz I, h. 312. Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahab*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t. Juz II, h. 124.

<sup>16</sup> al-Qurtubiy, *op. cit.*, h. 134. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), Juz I, h. 365.

<sup>17</sup> al-Qurtubiy, *ibid.* Ibnu Katsir, *ibid.*



berlaku seluruhnya, akan tetapi tertunda oleh sesuatu hal. Misalnya *talak raj'i* (talak satu atau dua yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang sudah digauli), dari segi lafaz talak hubungan suami isteri telah terhenti, akan tetapi masih banyak hukum lain yang tertunda masa berlakunya hingga masa *iddah* wanita itu berakhir.<sup>18</sup>

Dalam al-Qur'an dapat ditemukan beberapa macam bentuk lafal thalaq, bentuk (*sighat*) *isim mashdar* ( الطلاق ) dapat dilihat pada QS. al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229, dalam bentuk *fi'il madhi* ( طلقهن, طلقن, طلقواهن ) dapat dilihat QS. al-Baqarah ayat 230, 231, 232, 236 dan 237, QS. al-Ahzab ayat 49, QS. al-Thalaq ayat 1 dan QS. al-Tahrim ayat 5, dalam bentuk *isim maf'ul* ( المطلقات ) pada QS. al-Baqarah 228 dan ayat 241 dan dalam bentuk *fi'il amar* ( طلقوهن ) yang dapat dilihat pada QS. al-Thalaq ayat 1, seluruhnya berjumlah dua belas ayat dalam al-Qur'an yang terdapat pada lima surat.<sup>9</sup> Dalam surat al-Baqarah ayat 227 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 227)

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>10</sup>

Mengenai Asbabun Nuzul surat al-Baqarah ayat 229 al-Thabary menjelaskan banyak riwayat yang berkenaan dengannya di antaranya:<sup>8</sup>

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *ibid.*

<sup>9</sup> Ilmiy Zaadah Faidhullah-Husniy al-Maqdisiy, *Fath al-Rahman Li Thab Ayat al-Qur'an*, (Semarang: Maktabah Dahlan, tth), h. 274.

<sup>10</sup> Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramayn, Makkah al-Mukarramah, 1991. Selanjutnya tanpa menyebutkan kutipan Terjemahan ayat-ayat al-Qur'an merujuk kepada sumber ini.

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنفضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أفرئك ولا تحلين مني. قالت له: كيف؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف" الآية

Ibn Katsir menjelaskan ayat ini merupakan dasar kemaslahatan dalam rangka mengangkat kemudharatan hukum thalaq yang berlaku pada zaman jahiliyah dimana seorang suami dapat menthalaq istrinya dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemaslahatan yang terkandung dalam hak istri adalah bahwa ia kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menjadi objek talak yang sewaktu-waktu dan kapanpun dapat dithalaq seenaknya oleh suaminya. Ia juga mengungkapkan ayat ini merupakan nasakh hukum terhadap firman Allah dalam ayat 228 sebelumnya yaitu:<sup>9</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Ibn Katsir menambahkan bahwa ayat ini juga sebagai peringatan kepada para suami yang telah menthalaq istrinya sebanyak dua kali karena akibat hukum yang sangat berat setelah talaq yang ketiga.<sup>10</sup> Dalam menjelaskan ayat ini Ibn Katsir mengutip riwayat mengenai perbedaan antara thalaq raj'i dan ba'in berdasarkan pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasul dalam memahami ayat 229 ini yaitu:

<sup>8</sup> Al-Thabary, Abu JA'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayy al-Qur'ân*, jilid. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) 4 h. 538

<sup>9</sup> Ibn Katsir, *op.cit.*, j. 1 h. 610

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 611



قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرايت قول الله عز وجل: { فَإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ } أين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان"

Al-Raziy menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalam ayat ini memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tentang bolehnya thaaq tiga sekaligus atau tidak. Bagi kalangan yang menganggap ayat ini sebagai hukum dasar maka mereka tidak membolehkan talaq tiga sekaligus dan tetap dianggap satu. Pemahaman ini dipegang oleh Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin 'Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ariy dan Khudzaifah. Sementara bagi kalangan syafi'iyah ayat ini hanya berkenaan dengan rujuk dan bukan menjadi hukum dasar dalam thalaq sehingga bila talak tiga dijatuhkan sekaligus maka akan mengaikbatkan bain dan dihitung talaq tiga. Dengan demikian berlaku hukum wajibnya melepaskan istri dengan cara ihsan dengan tidak sedikitpun mengurangi haknya dan tidak ada rujuk bagi suami selama istri dalam masa iddah.<sup>11</sup>

Akibat hukum dari talak yang dilakukan sampai tiga kali lebih lanjut disebutkan dalam al-Baqarah ayat 230. al-Baghawiy menjelaskan ayat ini berkenaan dengan hadis:<sup>12</sup>

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت

<sup>11</sup> Al-Raziy, *op.cit.*, j.3 h. 328

<sup>12</sup> Al-Baghawiy, Muhammad al-Husein Ibn Mas'ud al-Farra', *MA'adim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*, jilid. 1( Beirut: Daar al-Fikr, 1985), h 273

طالقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدية الثوب، فبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة" قالت نعم قال: "لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسلته"

Dengan berbagai penafsiran di atas dapat dipahami bahwa penetapan hukum thalaq raj'iy dan ba'i didasarkan pada pemahaman para mufassir dalam memahami surat al-Baqarah ayat 229-230. Talak Raj'i dalam hukum fiqh berlaku pada seorang suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan satu talak, dia memiliki hak untuk merujuknya jika mau, selama masih dalam iddahnya. Apabila dia merujuknya kemudian menjatuhkan talak kedua, diapun masih memiliki hak untuk merujuknya kembali selama masih dalam iddahnya. Dalam dua keadaan tersebut dia masih sebagai isterinya, mereka berdua masih saling mewarisi, dan wanita tersebut masih berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal. Wajib bagi wanita yang dicerai dengan talak raj'i, yaitu dia yang mendapat talak satu dan dua setelah disetubuhi atau berkhulwat, untuk tetap tinggal dan beriddah dirumah suaminya, dengan harapan agar dia merujuknya kembali, dianjurkan baginya untuk berdandan dihadapannya agar berkeinginan untuk merujuknya, tidak dibolehkan bagi suami untuk mengeluarkannya dari rumah, walaupun dia tidak merujuknya, sampai iddahnya selesai.

#### **B. Nafkah Anak dalam ajaran Islam**



Kata nafkah berasal dari bahasa arab ( نفق - ينفق - نفقا ) yang berarti membelanjakan<sup>13</sup>. Ibn Arabiy menjelaskan bahwa kata نفق memiliki banyak makna di antaranya zakat wajib, nafkah suami pada ahli keluarganya , shadaqah sunnah, serta memenuhi hak-hak yang wajib selain zakat. Pengertian nafkah dengan arti shadaqah baik sunnah maupun wajib dinaskh dengan ayat-ayat zakat sehingga pengertian yang paling tepat adalah dengan makna al-itlaaf (menghabiskan).<sup>14</sup> Semua pengertian nafkah yang diungkap Ibn Arabiy di atas pada dasarnya merupakan pemahaman yang digali dari lafazh yang digunakan dalam al-Quran.

Sedangkan pengertian nafkah menurut istilah antara lain yang diungkapkan al-Zahabiy yaitu:<sup>15</sup>

اسم لما ينفق الانسان على زوجته وأقاربه ومما ليك

"Nama bagi semua yang dibelanjakan seseorang untuk istri, kerabat dan yang dimilikinya (budak)."

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah dalam artian sempit mencakup tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Dengan dihapuskannya perbudakan oleh ajaran Islam maka cakupan nafkah terhadap budak tidak lagi relevan untuk dikaji. Dalam makalah ini ada tiga hal yang menjadi persoalan pokok yaitu:

- a. Kewajiban orang tua terhadap Nafkah Anak dan Cakupan Kewajiban Nafkah Anak
- b. Batasan Umur Anak yang wajib dinafkahi

<sup>13</sup> Muhammad Idris Al Marbawy., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350 H), h. 336.

<sup>14</sup> Ibn Arabiy., *Ahkam al-Quran.* jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h. 18

<sup>15</sup> Muhammad Husein al-Zahaby., *Syariat al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahli al-Sunnah Wa Mazahid al-Jafariyah.*, (Mesir: Dar al-Taklif., 1986 ) h.197

a. Kewajiban Orang tua untuk menafkahi anak dan cakupannya

Salah satu ayat al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam menjelaskan kewajiban nafkah terhadap anak adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

Menurut al Qurtuby ada empat masalah yang terkandung dalam ayat diatas. Keempat hal tersebut adalah :<sup>16</sup>

- Kedudukan hukum memberi nafkah pada anak dan isteri adalah wajib
- Kewajiban memberi nafkah ada pada suami
- Kadar nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kebiasaan.
- Ayat diatas menjadi dalil wajib memberi nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami

Dalam memahami ayat di atas al-Jashash mengutip riwayat dari Umar, Zaid bin Tsabit, Hasan dan Qubaidhah bahwa yang dimaksud dengan *وعلى المولود له* adalah nafkah.<sup>17</sup> Wahbah zuhailiy menjelaskan bahwa ayat Al Quran diatas tidak menyebutkan secara tegas, rumah menjadi kewajiban suami menyediakannya

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al Anshary al Qurtuby, *Jami' al-ahkam al Quran*, juz 16 (Beirut: Dar- Al Kutub al Ilmuyati, 1413 H ), h 112 – 113.

<sup>17</sup> Al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) 554



sebagaimana makan dan pakaian<sup>18</sup>. Namun karena rumah merupakan kebutuhan pokok yang mesti ada dalam kehidupan, maka suami wajib menyediakannya sejajar / sama dengan keperluan makan dan pakaian. Ulama fiqh berbeda dalam menetapkan kadar besar – kecilnya nafkah istri yang harus dibayar suami, dan apakah keadaan istri juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan nafkah.

Ungkapan kata *bi al-ma'ruf* ( بالمعروف ) pada kedua ayat diatas mengisyaratkan bahwa kadar / ukuran besar – kecil nafkah istri disesuaikan dengan keadaan suami dan istri<sup>19</sup>. Juhur ulama, selain mazhab Syafi'i menetapkan bahwa nafkah istri itu diberikan secukup dan sepantasnya. Mereka tidak menetapkan jumlah besarnya nafkah, tetapi hanya disesuaikan kemampuan suami.<sup>20</sup> Hal yang sama diungkapkan pula oleh Wahbah Zuhaili, bahwa nafkah yang diberikan suami kepada istri didasarkan kepada keadaan dan kemampuan suami<sup>21</sup>. Sementara pendapat yang dipegangi oleh Imam Syafi'i adalah bahwa keadaan suamilah yang menjadi dasar ukuran besar kecil nafkah istri. Apabila suami orang mampu harus memberikan dua mudd makanan ( gandum ) kepada istrinya. Suami yang tidak mampu ( orang susah ) ia memberikan satu mudd makanan kepada istrinya, dan bila suami tergolong kepada ekonomi sedang, ia harus memberikan satu setengah mudd makanan. Baik yang

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Tafsir al Munir*, juz 27, (Beirut: Dar al Fikr Mu'ashirah, t.th) h. 285

<sup>19</sup> Ash-Shan'any, *Subulussalam*, jilid III, ( Bandung: Maktabah al-Dakhlan, . tth ) , h. 221

<sup>20</sup> Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420 H), h. 509

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 285

mampu, sedang dan tidak mampu melengkapi makanan tersebut dengan lauk – pauknya dan makanan tersebut harus dipenuhi setiap hari.<sup>22</sup>

Pendapat yang dipegangi oleh Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal<sup>23</sup>. Adalah apabila suami dan istri orang mampu, suami harus memberi nafkah kepada istri tingkat atas, bila keduanya dari kalangan ekonomi lemah ( susah ), suami harus memberi nafkah tingkat rendah, dan bila suami orang kaya ( mampu ) istri orang susah, maka suami harus memberi nafkah istri tingkat menengah, jika sebaliknya suami orang susah dan istri orang mampu, suami memberi nafkah istri menurut kemampuannya, dan kekurangannya dibayar bila keadaan ekonomi sudah baik.

Berdasarkan ilmu ushul fiqh, kedudukan lafzah nafkah yang masih umum maka dapat dipahami bahwa perlu penjelasan tentang bagaimana kadar dan ukuran nafkah serta apa saja yang menjadi cakupan nafkah tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditentukan kadarnya sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah minimal yang harus dibayar suami sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan kepada seseorang, yaitu satu mudd ( 675 gram ). Imam Syafi'i menyebutkan bahwa bila keadaan suami susah ia membayar nafkah untuk istrinya satu mudd, bila kemampuan suami menengah ( sedang ) satu mudd setengah dan bila keadaan suami mampu ia harus membayar nafkah istrinya dua mudd<sup>24</sup>. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i kadar nafkah makan untuk istri bukan berdasarkan ijtihad hakim atau mufti tetapi dilihat dari

---

<sup>22</sup> Saïd Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III. (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, T.h.), h. 176.

<sup>23</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969 ), h. 51

<sup>24</sup> Al Qurthubiy, *op cit.*, h. 112



keadaan dan kemampuan suami<sup>25</sup>. Di samping makanan, ayat di atas juga menunjukkan ulama atas kewajiban nafkah pakaian kepada isteri berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُلَّةً سَيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْقَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَتَقَفْتُهَا بَيْنَ يَسَائِي<sup>26</sup>

Kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada suami semakin dipertegas oleh pengaduan Hindun Binti Utaibah atas keengganan suaminya Abu sufyan memberi nafkah untuk dirinya dan anak mereka dalam hadis Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { دَخَلْتُ هُنْدَ بِنْتَ عُتَيْبَةَ - امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَفَةِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ }<sup>27</sup>

Al-Qurthubiy sebagaimana dikutip ibn Hajar menjelaskan perintah Rasul kepada Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan dalam hadis di atas bermakna ibahah (kebolehan). Yang dimaksud dengan ma'ruf dalam hadis di atas adalah bahwa kadar yang diketahui dengan adat kebiasaan cukup baginya.<sup>28</sup> Al-Syahih dalam hadis diatas berarti lebih umum dari bakhil karena bakhil hanya berkenaan dengan harta

<sup>25</sup> Wahbah Zuhailiy, *op cit.*, h. 291

<sup>26</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000) Juz 9, h. 640

<sup>27</sup> *Ibid.*, 628.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 635

sedangkan al-Syahir mencakup seluruh keadaan. Dikaitkannya istilah ini kepada Abu Sufyan karena ia tidak hanya menahan harta dari nafkah keluarganya tetapi juga dari dirinya.<sup>29</sup>

Sikap Hindun di atas bahkan dapat dinilai sebagai kebaikan sebagaimana Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Isteri yang mengambil harta suaminya untuk nafkah atas dirinya dan anaknya mendapat kebaikan dari perbuatannya tersebut sedangkan suaminya juga mendapat kebaikan dari hasil usahanya mengumpulkan harta tanpa menurangi kebaikan mereka satu sama lain. Hal ini diungkap Rasul SAW dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُقْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا » .<sup>30</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah menurut al-Quran dan Hadis ada di tangan suami. Persoalannya adalah bagaimana bila seorang suami atau ayah tidak lagi mampu memberi nafkah karena sudah meninggal dunia. Al-Jashshash menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang siapa yang wajib menafkahi. Umar bin Khattab berkata jika anak tidak memiliki ayah maka kewajiban nafkah ada pada ashabah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kewajiban nafkah ada pada ayah dan tidak ada pada ibu. Dengan demikian melalui pendkatan logika maka wajib dikhususkan kewajiban nafkah pada ashabah. Zaid bin Tsabit

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 635

<sup>30</sup> *Ibid.*, d. 628



mengatakan bahwa kewajiban nafkah berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan proporsi bagian dalam waris. Malik mengatakan kewajiban nafkah hanya dikhususkan pada ayah dan tidak mencakup ashabah. Maka seorang kakek tidak diwajibkan menafkahi cucunya. Syafii mengatakan bahwa tidak waib menafkahi pada anak yang masih kecil kecuali salah satu dari kerabat yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Dalam pandangan al-Jashash dari berbagai perbedaan ulama tentang kewajiban nafkah atas ahli waris tidak ada yang mengatakan saudara atau paman memiliki kewajiban menafkahi anak.<sup>31</sup>

#### *b. Batasan Usia Kewajiban Menafkahi Anak*

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>32</sup> Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>33</sup>

Ulama fiqh sependapat menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya dengan ketentuan ayahnya mampu atau dapat bekerja mencari rezeki.

---

<sup>31</sup> AL-Jashshash, *op.cit.*, h. 555

<sup>32</sup> Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 30-1.

tapi bila ayah benar – benar tidak mampu dan tidak bisa bekerja, maka ia tidak wajib membayar nafkah anaknya. Suami wajib memberi nafkah kepada istri, anak dan orang yang menjadi tanggungannya, sesuai kemampuan dan kesanggupannya. Jika suami orang susah ( فقير ) berikan nafkah sesuai keadaan kefakirannya dari rezeki yang ia peroleh, tetapi sebaliknya bila suami senang atau mempunyai kelapangan dari Allah, hendaklah ia menafkahi istrinya sesuai dengan kesenangannya.<sup>34</sup> Hanya saja tidak ditemukan penjelasan secara tegas dalam al-Quran mengenai batas usia wajibnya nafkah seorang anak.

Dalam bahasa al-Quran anak sering diungkapkan dengan kata *al-walad*. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wālid* dan *al-wālidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.<sup>35</sup> Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlād* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlūd*, tetapi disebut *al-janīn* yang berarti *al-mastūr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Di samping kata *walad*, kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghīr* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirāb*). Panggilan *ya bunayya* (wahai

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *op cit.*, h.282

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV (Jakarta, Lentera Hati, 2004), h. 614.



anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya.<sup>36</sup>

Meskipun al-Quran tidak menyebutkan secara tegas batasan usia anak yang wajib di nafkahi namun bila dibandingkan dengan penjelasan al-Quran terhadap kebolehan menyerhakan harta anak yatim, batasan usia ini ditentukan berdasarkan ayat berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan tata cara menyantuni anak yatim dengan menguji mereka sampai batas kedewasaan dan kewajiban mengembalikan harta mereka mereka bila mereka benar-benar telah dewasa. Bila dihubungkan hak pusaka dengan kewajiban memelihara anak yatim yang disebut secara beriringan dalam surat al-Nisa' tersebut maka dapat dilihat bahwa kewajiban memelihara anak yatim meskipun pada hakikatnya adalah tanggungjawab seluruh kaum muslimin, namun tanggungjawab tersebut lebih bagi ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan, dimulai dari saudara laki-lakinya (anak dari pewaris), kemudian berlanjut pada kakek (ayah dari pewaris) dan seterusnya berdasarkan urutan 'ashabah (ahli waris laki-laki yang mendapatkan seluruh atau sebagian harta waris).

---

<sup>36</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katolikiyah, t.th), h. 1019 dan 99

Di samping itu bila dibandingkan kewajiban memberi harta anak yatim ketika mereka telah diuji tingkat kecerdasannya yang terkandung dalam ayat di atas bila dikaitkan dengan nafkah anak dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah untuk anak juga termasuk pendidikannya. Hal ini disebabkan karena untuk mencerdaskan seorang anak pendidikan merupakan sesuatu yang wajib dalam nafkahnya. Hal ini sesuai dengan kaedah: <sup>37</sup> ما لا يتم الواجب الا به فله واجب.

Dengan demikian dapat dipahami batas kewajiban nafkah atas anak tidak hanya terkait dengan umur anak yang menentukan perkembangannya secara fisik maupun secara psikologis. Dalam beberapa materi hukum memang kebanyakan batas kewajiban nafkah atas anak terkait dengan usia anak. Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> A. Djazuliy, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 32

<sup>38</sup> Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

<sup>39</sup> Pasal 98 KHI



Dengan demikian kewajiban nafkah atas anak dapat berpindah dari ayah kepada orang lain . Bagaimana dengan ibu? Secara tegas berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan penalaran terhadap ayat al-Quran dan Hadis jelas bahwa kewajiban nafkah ada pada suami. Namun hukum ashal tersebut dapat berubah bila suami dinyatakan tidak mampu untuk memenuhi nafkah atas anak. Oleh karena itu hukum tersebut dapat berubah dengan beralihnya kewajiban nafkah kepada orang lain yang berarti bahwa kewajiban ayah tidak serta merta gugur karena ia tidak mampu, hanya saja hukum ashal tersebut berubah dengan berubahnya keadaan.

Sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya melalui pihak lain (suami atau wali), bukan berarti Islam tidak membolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan harta/ uang. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri. Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Allah Swt berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

“... Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan” (Qs An Nisa 32).

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan dari upaya menjelaskan dan mendeskripsikan (*explanatory and descriptive research*) dalam bentuk memberikan gambaran detail tentang gejala dan fenomena sosial yang diperkirakan terkait dengan masalah penelitian. Dengan demikian dalam pengolahan data penelitian digunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini maka data-data mengenai fenomena perceraian dan pengabaian atas perlindungan hak nafkah atas anak korban perceraian serta faktor yang mempengaruhi keduanya.

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu.<sup>40</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variable atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin dalam Junaidi Ghony bahwa alasan yang cukup valid untuk melakukan penelitian kualitatif adalah bahwa konvensi dari para peneliti itu berangkat dari penelitian berdasarkan atas pengalaman dalam penelitian berdasarkan pada pengalaman dalam penelitian. karena penelitian kualitatif

---

<sup>40</sup> Husaini Usaman dan Pumomo Setiadi Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: 2000, Bumi Aksara) h. 6



diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan oleh metode kuantitatif.<sup>41</sup>

Analisis kualitatif penting bagi kepentingan penelitian ini karena menurut M. Diah analisis kualitatif unggul dalam mendapatkan informasi yang sangat rinci dibandingkan penelitian kuantitatif. Dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum hak nafkah anak dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Untuk itu maka diperlukan generalisasi dalam sampel wawancara dan dokumen tertulis yang terdapat dalam penelitian kualitatif.<sup>42</sup> Data deskriptif yang berasal dari data sekunder digunakan untuk mendukung analisis penelitian secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi kesimpulan fenomena antara variable bebas dan variable tergantungnya, yang dalam hal ini merupakan analisis kuantitatif.

Dalam melaksanakan pendekatan secara metodologis tersebut maka diperlukan penetapan tentang metode penentuan daerah penelitian, metode pemilihan sampel penelitian, tahapan-tahapan penelitian mulai dari pengumpulan data hingga metode analisis yang digunakan hingga sampai kepada kesimpulan dari penelitian ini. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Anselm, Strauss dan Juliet, Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 1997, PT.Bina Ilmu) h. 13

<sup>42</sup> Diah M., *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan Alih Bahasa* (Pekanbaru : 2000, Pusat Balai Bahasa) h. 5

## **A. Penentuan Daerah Penelitian**

Penentuan daerah penelitian ini diperlukan untuk menentukan kriteria yang paling memungkinkan dalam penelitian ini sehingga memudahkan langkah-langkah operasional penelitian sehingga efektifitas dan validitas data yang dikumpulkan dapat terjamin untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini dipilihnya kota Pekanbaru sebagai daerah penelitian karena sebagai daerah yang sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat Pekanbaru juga mulai dihindangi permasalahan sosial sebagaimana kota besar lainnya, salah satunya anak-anak yang terlantar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak terlantar yang harus mencari nafkah sendiri tanpa bantuan dari keluarganya.

## **B. Jumlah Populasi dan Metode Pemilihan Sampel Penelitian**

Berdasarkan variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi subjek hukum penelitian adalah anak yang menjadi korban percerian dalam keluarga. Secara kuantitatif tidak ada data resmi yang dapat diperoleh tentang jumlah populasi tersebut secara statistik. Namun sebagai gambaran dari bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial Dinas Sosial PEMKO Pekanbaru, data terakhir yang dapat menggambarkan hal ini adalah jumlah anak terlantar yang ada pada tahun 2009. Pihak Dinsos Pekanbaru tidak memiliki data tentang pendataan bagi anak terlantar akibat putus sekolah tidak dianggarkan untuk dilakukan pendataan. Hal ini dikarenakan pendataan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja dan bila dianggarkan dalam APBD. Dalam



melakukan pendataan, Dinsos akan meminta bantuan pada relawan yang berada di setiap kelurahan yang ada di Pekanbaru. Untuk itu karena keterbatasan penelitian ini maka jumlah ini perlu direduksi dengan cara menentukan kelompok masyarakat yang dijadikan sampel penelitian (sampling). Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Dengan teknik ini maka jumlah sample tidak ditetapkan di awal penelitian, karena sample penelitian diperoleh secara insidental ketika ditemukan responden yang mengalami atau mengetahui permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

Dengan demikian jumlah populasi tidak menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian ini karena metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dalam penelitian kualitatif jumlah atau rasio responden tidak terlalu penting karena yang diteliti adalah variasi data. Penelitian akan terus berlangsung sepanjang ditemukannya variasi data dan akan dipadankan pada data yang ada bila data yang diperoleh dari responden-responden selanjutnya tidak menunjukkan variasi yang signifikan.

### C. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah teknik survei lapangan. Teknik ini ditujukan untuk mendapatkan sejumlah besar variabel mengenai sejumlah besar individu dengan alat ukur wawancara. Variabel yang digunakan dalam survei pada hakikatnya tidak terhitung banyaknya, mulai dari variabel dasar hingga

sikap dan pandangan responden, lingkungan sosial, kelakuan manusia, ciri-ciri khas demografis dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Dengan demikian instrumen utama dalam kegiatan pengumpulan data dari penelitian ini dimulai dengan observasi dan wawancara mendalam (depth interview) disamping metode lainnya seperti penyebaran kuisioner kepada responden untuk mengumpulkan data dari komunitas yang lebih luas dengan perkiraan variasi data yang relatif lebih homogen. Di samping metode ini dokumentasi merupakan data awal yang diperlukan dalam wacana geografis dan demografis penelitian.

Pada tahap awal dilakukan observasi terhadap titik-titik yang diasumsikan adanya anak-anak terlantar yang diabaikan pemenuhan hak nafkah mereka. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap sampel yang telah ditentukan dari populasi. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pada daftar pertanyaan, (wawancara terstruktur) yang turut melibatkan beberapa data kolektor yang sebelumnya telah mendapatkan penjelasan tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Di samping itu juga dilakukan wawancara bebas dengan *purposed samples* untuk mendapatkan keterangan komperhensif. Dalam proses selanjutnya data yang terkumpul melalui wawancara dievaluasi validitasnya dan dikelompokkan menjadi data-data yang terkumpul dalam berbagai kategori sehingga menggambarkan varians yang berbeda.

---

<sup>43</sup> Soleman b. Taneko. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: 1984. Rajawali Press) h. 36



Selanjutnya, dilakukan quessioner (penyebaran angket) terhadap sebaran sample yang lebih luas dan banyak. Quessioner ini digunakan sebagai bahan data bagi analisis kwanitatif yang akan dilaksanakan. Quessioner ini dilakukan berdasarkan pada daftar pertanyaan (wawancara terstruktur) yang disusun dan diuji, validitasnya untuk menentukan hubungan pengaruh migrasi terhadap perubahan sosial yang telah diinventarisir melalui wawancara. Dalam pelaksanaannya penyebaran quessioner ini juga dibantu oleh data kolektor yang telah mendapat penjelasan tentang rancangan penelitian ini.

#### **D. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dalam dua tahapan tersebut akan diolah dengan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

1. Melakukan editing data secara manual dalam rangka menglompokkan data
2. Melakukan inventarisasi dari seluruh variasi data yang ditemukan untuk ditabulasikan dan dianalisis dengan metode yang sesuai.
3. Analisis data dengan teknologi komputer, yang dimulai dengan penetapan buku kode, pengkodean data pada code sheet, penyusunan daftar variabel yang akan ditabulasikan dan dianalisis kemudian mengujinya pada software program yang tepat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Fenomena perlindungan hak nafkah atas anak korban perceraian di kota Pekanbaru

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.<sup>44</sup> Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya akumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (*social movement*).<sup>45</sup> Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan tayangan yang besar dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling

---

<sup>44</sup> Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96.



mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat.<sup>46</sup>

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan Permasalahan-permasalahan pada anak. Diantaranya kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran ekonomi, kekerasan ekonomi, eksploitasi, trafficking, pelecehan seksual, anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Berikut ini data anak korban tindakan kekerasan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 Tahun.

**Tabel IV.1**

**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan (Pmks) Sosial Korban Tindak Kekerasan (Ktk) Kota Pekanbaru**

| NO | Kecamatan         | KF | KP | PE | KS | EKS | TRAF<br>F | Jumlah |
|----|-------------------|----|----|----|----|-----|-----------|--------|
| 1  | Pekanbaru Kota    | 10 | 8  | 10 | 9  |     |           | 37     |
| 2  | Sail              | 7  | 15 | 20 | 8  |     |           | 50     |
| 3  | Senapelan         | 15 | 7  | 19 | 10 | 9   |           | 60     |
| 4  | Limapuluh         | 10 | 4  | 10 | 20 |     |           | 44     |
| 5  | Sukajadi          | 21 | 10 | 10 | 18 | 3   |           | 62     |
| 6  | Bukit Raya        | 18 | 9  | 11 | 26 | 10  |           | 74     |
| 7  | Rumbai            | 21 | 8  | 18 | 19 | 5   | 2         | 77     |
| 8  | Tampar            | 20 | 11 | 20 | 32 | 10  |           | 93     |
| 9  | Payung Sekaki     | 10 | 13 | 14 | 16 |     |           | 53     |
| 10 | Marpoyan<br>Damai | 22 | 12 | 28 | 2  | 5   | 1         | 89     |
| 11 | Rumbai Pesisir    | 8  | 15 | 17 | 14 | 4   |           | 58     |
| 12 | Tenayan Raya      | 20 | 5  | 15 | 14 |     |           | 54     |

<sup>46</sup> Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) h. 28.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kekerasan terhadap anak adalah tingginya angka perceraian di Pekanbaru. Di pekanbaru hingga bulan Agustus 2013 sedikitnya tercatat ada 723 cerai gugat dan 322 cerai talak. Secara statistik, angka perceraian dibandingkan perkara lain yang ditangani oleh pengadilan Agama Pekanbaru dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.1**

**REKAP JENIS PERKARA DITERIMA  
TAHUN 2013 (SEPTEMBER)**

| No. | Jenis Perkara                  | Total       |
|-----|--------------------------------|-------------|
| 1.  | Izin Poligami                  | 0 Perkara   |
| 2.  | Pencegahan Perkawinan          | 0 Perkara   |
| 3.  | Penolakan Perkawinan oleh PPN  | 0 Perkara   |
| 4.  | Pembatalan Perkawinan          | 0 Perkara   |
| 5.  | Kelalaian Atas Kewajiban       | 0 Perkara   |
| 6.  | Cerai Talak                    | 322 Perkara |
| 7.  | Cerai Gugat                    | 723 Perkara |
| 8.  | Harta Bersama                  | 16 Perkara  |
| 9.  | Penguasaan Anak                | 8 Perkara   |
| 10. | Nafkah Anak oleh Ibu           | 1 Perkara   |
| 11. | Hak Hak Bekas Istri            | 0 Perkara   |
| 12. | Pengesahan Anak                | 0 Perkara   |
| 13. | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 Perkara   |
| 14. | Perwalian                      | 12 Perkara  |



|                     |                                    |                     |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 15.                 | Pencabutan Kekuasaan Wali          | 0 Perkara           |
| 16.                 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | 0 Perkara           |
| 17.                 | Ganti Rugi Terhadap Wali           | 0 Perkara           |
| 18.                 | Asal Usul Anak                     | 1 Perkara           |
| 19.                 | Penetapan Kawin Campur             | 0 Perkara           |
| 20.                 | Isbat Nikah                        | 24 Perkara          |
| 21.                 | Izin Kawin                         | 0 Perkara           |
| 22.                 | Dispensasi Kawin                   | 5 Perkara           |
| 23.                 | Wali Adhal                         | 4 Perkara           |
| 24.                 | Pengangkatan Anak                  | 0 Perkara           |
| 25.                 | Ekonomi Syariah                    | 1 Perkara           |
| 26.                 | Kewarisan                          | 40 Perkara          |
| 27.                 | Wasiat                             | 0 Perkara           |
| 28.                 | Hibah                              | 0 Perkara           |
| 29.                 | Wakaf                              | 0 Perkara           |
| 30.                 | Zakat/Infak/Shadaqah               | 0 Perkara           |
| 31.                 | P3HP                               | 0 Perkara           |
| 32.                 | Lain-Lain                          | 9 Perkara           |
| <b>Jumlah Total</b> |                                    | <b>1166 Perkara</b> |

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di lapangan yang peneliti dapatkan tentang perlindungan hukum atas hak nafkah anak yang menjadi korban perceraian, dapat dilihat dalam beberapa kasus. Dalam hal ini peneliti mengunjungi langsung salah satu responden yang bernama Ibu "S" dan Ibu "D" di kediamannya.

Ibu "S" adalah isteri dari "SH" berumur 41 tahun, saat ini bekerja di pasar sebagai pedagang cabe serta tinggal di Jalan Sungai Kampar Kel. SEKIP Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Ibu "S" melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh pada 09 Februari 1990. Setelah pernikahan itu Ibu "S" dan "SH" bertempat tinggal awalnya di rumah kontrakan selama 3 tahun, terakhir di rumah kediaman bersama selama 14 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut "S" dan "SH" hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak. Namun anak kedua dari pernikahan tersebut telah meninggal pada usia 7 tahun dan kini mereka memiliki 4 orang anak yang masih hidup.

Ketika peneliti melakukan hunting lokasi rumah Ibu "S" beliau berada di rumah dan kami langsung bertemu dan melakukan wawancara terstruktur kepada Ibu "S". Setelah meminta izin untuk wawancara ternyata beliau menanggapi dengan sangat antusias dan responsif. Selanjutnya peneliti langsung menanyakan apa yang diketahui tentang tanggung jawab suami beliau menjawab: Tanggung jawab suami? Apa ya.....eeee.....tanggung jawab suami itu ya.....ada tanggung jawab lahir yaitu nafkah buat keluarga.....trus ada lagi yang namanya tanggung jawab batin seperti hubungan badan suami istri.

Sesuai dengan pemahaman tersebut, peneliti menanyakan nafkah seperti apa yang dimaksud Ibu Salamah, maka ia mengatakan: "Nafkah itu ya yang dimakan tiap harinya buat anak dan isteri itu yang harus nya komplit...itu kan nggak ada". Setelah itu, peneliti bertanya tentang faktor yang menyebabkan suami melalaikan tanggung



jawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga: Yach nggak tahu.. ya dari situ sendiri, pokoknya ditelantarkan begitu saja ya nanggung hutang, bebannya anak itu saya sendiri. Menurut suami.. saya itu sudah tidak ada benarnya. Sedangkan saya menikah sama saya dulu itu tidak bawa apa-apa.

Selama pernikahan Ibu "S", tidak pernah menerima pemberian nafkah dari suami kepada keluarga. Karena dari awal pernikahan, "SH" belum memiliki pekerjaan. Selanjutnya, peneliti menanyakan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Ibu "S" dengan bapak "SH" ia menuturkan: " yang pertama itu masalahnya kan ya suami itu selingkuh kan kalau ditanya kan nggak dijawab. Terus nggak pulang tiga bulan, empat bulan terus saya susul lah...terus pulang, ketemu lagi, permasalahan lagi sama muridnya. Kalau ditanya kan nggak jawab, nanti saya dipukul. Terus nggak pulang tiga bulan, empat bulan terus saya jemput lah. Terus saya Tanya lagi, pukul lagi.....hancurnya keluarga saya itu yach semenjak lima tahun yang lalu, bahkan itu pada saat ibu saya sakit dan sampai meninggal."

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, maka Ibu "S" mengatakan: Suami melakukan kekerasan (memukul) itu mulai jadi PNS. Ibu "S" dengan membawa beberapa lembar kertas berisikan laporan gaji bulanan sang suami yang juga menjadi salah satu permasalahan di dalam rumah tangga, kemudian dengan menarik nafas ia pun kembali menceritakan permasalahan lain. Ia mengatakan: "Selain itu juga aslinya dia itu korupsi bayaran jadi gini.....kan aslinya gajinya itu dua juta rupiah...tapi yang dikasihkan ke saya itu cuma satu juta

empat ratus. Terus saya pernah ke kantor dinas kan tanya....nggak tahunya gajinya itu dua juta lebih.

Pada tahun 2007 pasangan ini bercerai dan hampir 3 tahun ini ibu "S" tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan bapak "SH". Dengan demikian sebenarnya sebelum bercerai pihak suami (Bapak "SH") sudah mengabaikan tanggungjawab nafkah kepada ibu "S" dan keempat anaknya. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua perempuan mampu untuk memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dewasa ini, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada orang tua atau tergantung pada suaminya jika telah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah anak tidak begitu menjadi persoalan apalagi sejak dalam masa perkawinan pihak istrinya yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya.

Dalam kasus lain, seorang wanita berinisial "D" adalah isteri dari Pak "MS" yang saat ini berusia 50 tahun. Perkawinannya dengan Pak "MS" ini merupakan perkawinan yang keempat dan dikaruniai empat orang anak dari hasil perkawinannya yang ketiga. Dari perkawinannya yang keempat ini, ibu "D" mulai turut bekerja sedangkan pada perkawinan yang sebelumnya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah saja. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu "D" di



kediamannya. Melalui keterangan dan pendekatan dari ketua RT setempat ibu "D" peneliti berhasil menjumpai beliau dan siap untuk diwawancarai.<sup>47</sup>

Selanjutnya kami langsung menanyakan apa yang diketahui tentang tanggung jawab suami tentang nafkah. Ia mengatakan : "Nafkah itu ya belanjanya buat saya setiap harinya. Ya masalah tiap harinya itu ....sudah putus asa aku apa tiba-tiba di tinggal. Bagaimana maunya, kecapean juga. Sering bertengkar masalah uang belanja. Tiba-tiba sudah melarikan diri, nggak pernah mukul saya. Ya tiba-tiba di tinggal gitu aja dah, sampai sekarang. Sudah 9 tahun nggak ngasih nafkah sesudah pisah."

Menanggapi penjelasan dari Ibu "D" peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya tentang upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya itu. Sebagai sorang isteri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami, maka isteri tidaklah hanya tinggal diam saja. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibu "D", ia telah melakukan beberapa upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya pemberian nafkah dari suami.

Peneliti menanyakan kepada Ibu "D" terkait dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Beliau menjawab: "Yach....pokoknya saya sebagaimana sich orang bekerja bisa mencukupi kebutuhan anak dan juga bagaimana saya bisa bayar hutang punya kita berdua selama pernikahan dan hutang saya itu banyak. Saya jualan

---

<sup>47</sup> Ibu "D", warga kel. Rumbai Pesisir. *Wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2013.

keliling itu dengan usaha sendiri. Pokoknya sesudah jualan itu, beli barang dagangan di agen lagi.

Pekerjaan tersebut bisa membuatnya memenuhi kebutuhan dirinya dan kedua anaknya di rumah. Selain itu, ia juga menyewakan kamar-kamar kosong yang berada di dalam rumahnya guna untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, akhirnya ia pun merasakan lelah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat karena anak-anak Ibu "D" pun sudah mulai beranjak dewasa. Ia ingin melakukan upaya yang benar-benar bisa membuat suaminya untuk membayar nafkah keluarga.

Ketika ditanya tentang harapan beliau, Ibu "D" sebenarnya menghendaki agar suaminya bertanggung jawab atas kelalaian tanggung jawabnya yang tidak ia penuhi dari masa yang lalu dengan beberapa upaya. Adapun upaya yang pertama sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, sedangkan upaya lain yang dilakukan Ibu "D" adalah dengan menggugat cerai. Namun, entah bagaimana ia berubah pikiran dan tidak jadi menggugat suaminya yang meninggalkannya tanpa adanya perceraian sedangkan ia telah merasa bahwa dirinya sudah tidak bisa bersatu lagi dengan suaminya.

Ia merasa bahwa gugatan ke pengadilan tidak akan membuahkan hasil berupa tanggungjawab suaminya. Ia yakin persoalan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Namun bagaimana lagi, dipaksakanpun ia tahu bahwa



kondisi suaminya juga tidak mampu untuk menafkahi mereka karena memang pekerjaannya yang tidak menentu. Untung saja ia masih memiliki harta warisan yang dapat dijadikan modal untuk menghidupi keluarganya.

Dari informasi di atas, menunjukkan bahwa responden tidak mau menuntut hak nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya diakibatkan keyakinanya bahwa suaminya tidak akan mematuhi isi putusan Pengadilan karena memang tidak mampu memberi nafkah bahkan sejak masih terikat pernikahan. Makanya ketika terjadi gugatan cerai ia tidak memasukkan gugatari nafkah dalam salah satu butir tuntutananya sehingga hakim tidak menetapkan kewajiban nafkah atas suaminya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ketika orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak adalah misalnya orang tua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi sehingga dengan bantuan orang tuanya, persoalan biaya nafkah tidak menjadi persoalan baginya. Keadaan ini juga ditemukan dalam jawaban responden dalam penelitian ini.

Untuk kasus anak korban perceraian, setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan pada dasarnya berhak melanjutkan hidup dengan menikah lagi. Namun demikian, meskipun kedua pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan Pengadilan Agama yang memutus perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal orang tua telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki

tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali orang tua laki-laki tersebut sangat berkecukupan secara finansial.

Uraian di atas senada dengan apa yang dialami seorang anak bernama "M.A" yang berumur 14 tahun, dimana orangtua nya telah bercerai sejak ia berumur 8 tahun. Pada awalnya ia ikut dengan neneknya dan neneknyalah yang selama ini memberikan nafkah atas dirinya. Namun seiring dengan usia nenek yang sangat lanjut, ia merasa kasihan dan memutuskan untuk ikut dengan keluarga jauh yang tinggal di lain kota sejak setahun yang lalu. Namun karena tidak harmonisnya hubungan mereka maka ia memutuskan untuk ikut dengan temannya dan menjadi anak gelandangan di kota Pekanbaru. Ia sendiri merasa kehilangan yang sangat mendalam karena pada usia muda dimana ia semestinya masih berada dalam kasih sayang orang tuanya namun harus merasakan pahitnya hidup enafkahi dirinya sendiri tanpa ada modal apapun.

Ketika ditanya tentang bagaimana hubungannya dengan orang tua kandungnya, ia mengatakan: ia pernah mendatangi ayah kandungnya di kampung yang sudah menikah lagi dengan orang lain namun ayahnya tidak mau mempedulikan dirinya karena ia sudah pusing memikirkan keluarga yang baru dibinanya bersama istrinya yang baru. Demikian juga ibunya, tidak mau peduli dengan dirinya karena ibunya juga sudah menikah dengan laki-laki lain dan tidak ingin kehadiran dirinya mengganggu rumah tangganya itu. Akhirnya ia memutuskan untuk terus ikut dengan temannya menghidupi dirinya sendiri.

Dengan menikah lagi, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansial orang tua terutama laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus



membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena orang tua laki-laki (ayah) harus membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu. Dengan mempunyai keluarga yang baru dan membutuhkan biaya nafkah pula untuk membiayai keluarganya yang baru. Dalam hal ini, orang tua laki-laki (ayah) sangat sulit untuk menyisihkan penghasilannya untuk guna memberikan biaya.nafkah anak dari perkawinan sebelumnya. Meskipun dalam hal ini tentunya faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi yang lebih dominan, namun faktor ini sangat berkaitan erat dengan faktor ekonomi dari orang tua laki-laki (ayah). Jadi faktor telah menikah lagi ini sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi.

Disamping itu juga diperoleh keterangan dari "MA" bahwa alasan tidak diberikannya biaya nafkah anak oleh orang tua laki-laki (ayah) disebabkan istri baru dari ayahnya tersebut tidak mengizinkan untuk memberikan biaya nafkah anak dari perkawinan yang terdahulu sehingga ia tidak lagi menjalankan kewajibannya.

Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaa retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya

sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak.

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan.

Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan ayahnya melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya disebabkan faktor perselingkuhan. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan ayah tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Keadaan ini ditemukan pula dalam jawaban responden dalam penelitian ini. Disamping itu, ayahnya juga tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis karena ia menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya ia tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya.



B. Perlindungan hak nafkah atas anak korban perceraian di Kota Pekanbaru dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Jika diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam serta beberapa ketentuan tradisi adat di Indonesia mengatur bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelaki yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawab.

Dengan demikian sesungguhnya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian ini dari segi nafkah sangat diperlukan untuk menghindari tindakan kezhaliman dan berbabagi permasalahan sosial yang mungkin muncul karenanya. Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jelasnya, pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa

tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan harta pribadi istri.

Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>53</sup> Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat :

- a. menentukan nafkah yang ditanggung suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Menurut peneliti hal tersebut di atas merupakan tindakan sementara dari pengadilan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung diterapkan lebih dulu kepastian yang menjamin pembayaran nafkah istri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Karena jika tidak ditetapkan lebih, selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung terkadang prosesnya lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, kemungkinan besar suami tidak mau memberi nafkah hidup istri atau suami tidak bersedia memberi biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak.

Secara hukum, gugatan terhadap kewajiban pemberian nafkah ada dua cara yang dapat ditempuh penggugat, yaitu:



- a. Diajukan Dalam Surat Gugat Bersama Gugatan Pakok Penggugat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan sita marital dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok. Dari segi perkara pun cara yang seperti ini paling efisien. Tidak banyak buang waktu, karena pada saat penggugat mengajukan gugatan, sekaligus mencakup gugatan pokok gugatan penetapan nafkah, pemeliharaan anak dan pemeliharaan harta perkawinan.
- b. Permohonan Diajukan di Persidangan Pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung istri sebagai penggugat mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah biaya hidup istri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setiap bulan, selama proses pemeriksaan perkawinan berlangsung. Terhadap permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak dilakukan pemeriksaan dan langsung diputus lebih dulu dengan menunda pemeriksaan pokok perkara. Putusannya dituangkan dalam bentuk putusan "sela". Hakim dapat menolak atau mengabulkan. Terhadap putusan yang mengabulkan permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak maupun terhadap sita marital tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Tidak menjadi masalah apakah pengabulan berbentuk putusan provisi atau putusan sela. Sebab, putusan provisi maupun putusan sela bukan putusan akhir (*eind vonnis*). Kedua putusan tersebut merupakan bentuk putusan yang dijatuhkan mendahului putusan akhir. Kemudian, putusan provisi atau putusan sela mengenai biaya nafkah dan

pemeliharaan anak dapat dilaksanakan segera. Jika sekiranya hakim mengabulkan bahwa suami wajib membayar nafkah istri setiap bulan, hal itu mesti dilaksanakan suami. Jika dia tidak mau melaksanakan secara sukarela, pengadilan dapat melaksanakan melalui eksekusi.

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 213 KUHPerdara tidak perlu mencari konstruksi atau pendekatan analogi tentang dapatnya dilaksanakan lebih dulu putusan sela yang menetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, karena Pasal 213 KUHPerdara rumusannya tegas menyatakan dapat dilaksanakan yang berbunyi: "Si istri berhak menuntut tunjangan nafkah yang mana setelah ditentukan oleh Hakim, harus dibayar oleh suami kepadanya selama perkara berjalan.

Mengenai pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orangtua kepada anak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa kekuasaan orang tua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orang tua dalam kedudukannya yang seimbang. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.



Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga dengan tegas menyatakan, bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh si bapak/ayah. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah.

Dengan demikian, apabila putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan, harus mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian. Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), atau KUA kecamatan tempat para pihak dahulu melakukan perkawinan.

Dalam putusan mengenai perebutan hak asuh anak dan persengketaan harta bersama, pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia

melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.

Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah terhadap istri dan anak. Mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak dan mantan istri yang telah diceraikan, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang yang beragama islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut. Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah bagi anak dan si istri yang diceraikan oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian.

Pasal 225 (1) HIR menyebutkan jika seseorang dihukum melakukan perbuatan tertentu, dan ia tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang mendapat keuntungan dari putusan itu, dapat mohon kepada pengadilan negeri lewat ketuanya dengan lisan atau tertulis, supaya kepentingan yang ia peroleh itu kalau putusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang tunai, jumlah uang



mana harus ia diterangkan dengan tegas; jika permohonan ini diajukan dengan lisan maka harus dicatat.

Dalam perspektif hukum Islam, *fuqaha*<sup>5</sup> memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan<sup>5</sup>. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha*<sup>6</sup> mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (*jami'*) tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, sebagaimana *kafarat* yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya. Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.

Pengertian ini memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah isteri, bersifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah itu menyesuaikan kemampuan suami (سعة). Terkait dengan hal ini, *fuqaha'* rupanya telah merumuskan batas minimal jumlah nafkah. Sebagai contoh kalangan Syafi'iyah, menentukan ukuran minimal nafkah sebesar satu *mud* makanan atau senilai 171,04 *dirham* untuk setiap harinya dimulai sejak fajar hari itu. Batas minimal ini akan menjadi penting saat dihadapkan pada pertimbangan apakah seorang suami dinyatakan telah menafkahi atau tidak, saat hal itu dijadikan alasan gugatan nafkah oleh isteri atau dalam alasan perceraian karena tidak dinafkahi. Menengahi hal ini maka agaknya menjadi hal yang bijak jika hakim cenderung kepada pertimbangan kepatutan secara sosial (*'urf/ma'ruf*) bersamaan dengan pertimbangan keluasan/kemampuan suami, sementara ukuran yang telah ditentukan *fuqaha'* itu cukup diadopsi nilai-nilai dan maksud-maksudnya saja yang diinternalisasikan dalam ukuran baru yang menurut hakim tepat dan proporsional.<sup>48</sup>

Imam Syafi'i dalam *Al Umm* merumpunkan beberapa ayat al Quran yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Ayat-ayat tersebut antara lain, QS. Al Baqarah (2) : 228 dan 233, QS. Al Nisaa (4) : 19 dan 34, QS. Al Ahzab (33) : 50. Sementara dasar hukum Nafkah dari *Al Sunnah* sangat

---

<sup>48</sup> Abdurrahman AL Jaziriy, *Op.Cit.* Juz IV, h. 265



banyak, namun ada beberapa riwayat yang tingkat intensitas penggunaannya relatif sering digunakan oleh *fuqaha*.<sup>49</sup>

Dasar-dasar tersebut secara eksplisit menyebut eksistensi nafkah dalam tradisi hukum Islam. Informasi penting dari dasar-dasar tersebut adalah bahwa keberadaan nafkah merupakan konsekuensi hukum dari adanya jalinan antara laki-laki dan perempuan dalam rumpun keluarga. Bila dirumuskan status hukum nafkah itu dalam jalinan perkawinan, maka dasar-dasar tersebut oleh *fuqaha* telah sangat jelas menyandangkan hukum wajib. Tentunya hukum wajib nafkah tidak berdiri sendiri, melainkan didasari pula oleh aspek-aspek lain yang memengaruhinya, termasuk di dalamnya sebab-sebab kewajiban nafkah dan juga rentetan hukum lain yang nafkah adalah alas haknya.

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) *Zaujiyyah*, yaitu karena ikatan pernikahan yang sah. Peranakan dari sebab ini adalah nafkah bagi isteri dalam talak *raj'i* dan talak bain hamil. Namun dalam talak bain hamil, kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja.
- 2) *qarabah*, yaitu sebab hubungan kekerabatan. Dalam hal ini *fuqaha* berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya pada hubungan orangtua dan anak (*walid wal walad*). Kalangan Syafi'iyah, menilai *qarabah* dalam hubungan orangtua dan anak, dan hubungan cucu dan

<sup>49</sup> Lihat Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al Umm*, Jilid V, Dar Al Ma'rifah; Beirut, 1393, h. 86

<sup>50</sup> Lihat Wahbah Al Zuhailiy, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid X, Hal.105

kakek (*ushul dan furu*). Hanafiyah, menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah*, tidak terbatas *ushul dan furu*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzawil arham*. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardh* dan '*ashabah*, meliputi *ushul, furu*', *hawasyi*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab,

- 3) *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dll. Luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*isaar*) pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zaujiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *isaar* tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Kesimpulan hukum *ulama* dari dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya adalah menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan



kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya. Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kaitah kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah. Selanjutnya *ulama*<sup>2</sup> juga merinci hubungan hukum nafkah antara cucu dan kakek. Namun dalam hal ini kewajiban tersebut bersifat relatif pula, artinya ketika seorang anak sudah kehilangan ayahnya, sementara kakeknya masih hidup dan dalam kondisi yang sanggup untuk menafkahi cucunya, maka ia wajib untuk menafkahi cucunya tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah). Namun demikian dalam menetapkan kewajiban nafkah setelah terjadinya perceraian tetap dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua laki-laki yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki yang bersangkutan. Selain itu, juga dilihat dari kemampuan orang tua laki-laki tersebut secara fisik dalam mencari nafkah.

Upaya yang dapat ditempuh oleh orang tua perempuan dalam hal orang tua laki-laki tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama, orang tua perempuan sebenarnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan

Agama. Namun demikian kesadaran hukum dan berbagai faktor menyebabkan orangtua perempuan tidak mau melakukan upaya hukum sehingga dapat dilihat betapa lemahnya perlindungan hukum yang ada dalam memastikan hak nafkah dapat ditunaikan dengan baik bagi anak-anak pasca terjadinya perceraian.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam hakikatnya membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah). Namun demikian dalam menetapkan kewajiban nafkah setelah terjadinya perceraian tetap dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua laki-laki yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki yang bersangkutan. Selain itu, juga dilihat dari kemampuan orang tua laki-laki tersebut secara fisik dalam mencari nafkah.
2. Upaya yang dapat ditempuh oleh orang tua perempuan dalam hal orang tua laki-laki tidak memberikan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama, orang tua, perempuan sebenarnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama. Namun demikian kesadaran hukum dan berbagai faktor menyebabkan orangtua perempuan tidak mau melakukan upaya hukum sehingga dapat dilihat betapa lemahnya

perlindungan hukum yang ada dalam memastikan hak nafkah dapat ditunaikan dengan baik bagi anak-anak pasca terjadinya perceraian.

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan di atas maka peneliti dalam hal ini memberikan saran:

1. Biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian harus tetap dapat terjamin karena masa depan anak masih sangat panjang, oleh karenanya upaya penegakan hukum tentang kewajiban nafkah anak korban perceraian dalam keluarga harus dilaksanakan. Untuk itu Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan matang tentang permohonan biaya nafkah anak yang dimohonkan. Kondisi ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang sering menjadi pertimbangan dalam memutus, memang tetap harus dipertimbangkan, akan tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengabulkan sama sekali permohonan tersebut sebab ke masa depan tidak ada yang dapat menjamin bahwa orang tua laki-laki (ayah) tersebut akan tetap dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi. Oleh karenanya, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, sebagai langkah awal untuk melindungi kepentingan anak, biaya nafkah anak harus tetap diputus oleh Pengadilan Agama.
2. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya, diputus oleh Pengadilan Agama atau tidak, hal tersebut secara moral, secara adat, dan agama merupakan kewajiban orang tuanya. Oleh karenanya,



orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seyogyanya memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuliy, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 32
- Abu Abbdillah Muhammad ibn Ahmad al Anshary al Qurtuby, *Jami' al-ahkam al Quran*, juz 16 (Beirut: Dar- Al Kutub al Ilmuyati, 1413 H)
- Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420 H)
- Al-Baghawy, Muhammad al-Husein Ibn Mas'ud al-Farra', *MA'aalim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Takwil*, jilid. 1( Beirut: Daar al-Fikr, 1985)
- AL-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- al-Qurtubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz III
- Al-Thabary, Abu JA'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'aqn Ta'wil Aayy al-Qran*, jilid. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)
- Anselm, Strauss dan Juliet, Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 1997. PT.Bina Ilmu)
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet-2: Jakarta: Balai Pustaka, 1988),
- Ash-Shan'any., *Subulussalam.*, jilid III. ( Bandung: Maktabah al-Dakhlan, . tth)
- Diah M., *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan Alih Bahasa* (Pekanbaru : 2000, Pusat Balai Bahasa)
- Fakhr al-Din al-Razy, *Mafatih al-Ghayb ( Tafsir al-Kabir)*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz III.
- Husaini Usaman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: 2000, Bumi Aksara)
- Ibn Arabiy, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th.)
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), Juz I.
- Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhuriy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000) Juz 9
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969 )
- Ilmiy Zaadah Faidhullah-Husniy al-Maqdisiy, *Fath al-Rahman Li Thab Ayat al-Qur'an*, (Semarang: Maktabah Dahlan, tth)
- Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut. al-Mathba'ah al-Katsolikiiyyah, t.th)



- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV (, Jakarta, Lentera Hati, 2004)
- Mosthamir Thalib, *Melancong Bumi Lancang Kuning* , (Jakarta: 1994, Pustaka Sastra)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, 1985)
- Muhammad Husein al-Zahaby., *Syariat al- Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahli al-Sunnah Wa Mazahid al- Ja'fariyah.*, (Mesir: Dar al-Taklif., 1986 )
- Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1994
- Muhammad Idris Al Marbawy., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350 H),
- Raghib al-Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Maktabah al-Ashriyyah, 2006)
- Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, T.h.)
- Soleman b. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. (Jakarta: 1984, Rajawali Press)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al Fikr, 1989)
- , *Tafsir al Munir*, juz 27, (Beirut: Dar al Fikr Mu'ashirah, t.th)
- Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahab*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, tt. Juz II